****



RANCANGAN

RENJA

KECAMATAN MANDIRAJA

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

 KECAMATAN MANDIRAJA

JalanPemuda Nomor 5 Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara

Telp. (0286) 411474 Fax (0286) 411474 Kode Pos 53174

e\_mail : kec\_mandiraja@banjarnegarakab.go.id

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

* 1. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

* + 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
		4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
		5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
		6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		7. UU tentang Penyelenggaraan urusan yang diampu
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
		9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
		10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
		11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
		12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
		13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
		14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
		16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
		17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
		18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
		19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

* + 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
		4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

* + 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
	1. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk:

Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2023 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;

Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023;

Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

* 1. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

**BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

**BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2023.

**BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

**BAB 5 : PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.172.894.350,-dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.
4. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
5. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
6. Adanya Pandemi Virus Corona -19 yang telah merubah dan menggangu semua lini kehidupan.

Dari 5 program,10 kegiatan, dan 26 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.127.894.350,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut karena dengan adanya Rasionalisasi Anggaran dan penghapusan honor didalam kegiatan sehingga mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 5 program, 10 kegiatan, dan 27sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.969.512.130,-

Dinamika yang terjadi selama tahun 2021 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah.Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

1. Realisasi program/kegiatan/yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik Kegiatan Pelaksanan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. Sub Kegiatan Pelaksanaa urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha,Sub Kegiatan Pelaksanaa urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan,Sub Kegiatan Pelaksanaa urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaiantersebut antara lain adalah:

1. Untuk perijinan usaha tidak ada pemohon, kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami kelesuan karena dampak pendemi Covid19.
2. Masyarakat memilih untuk menggunakan aplikasi pelayanan digital atau online khususnya untuk pelayanan pengantar akte kelahiran, kematian, pengantar pindah keluar dan pengantar datang.
3. Khusus untuk pengantar perijinan keramaian pada tahun 2021 Kecamatan Mandiraja tidak mengeluarkan ijin keramaian, hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka menekan penyebaran Covid19.
4. Adanya data yang berubah dari baku awal jumlah yang diterima dari BPPKAD namun setelah dilakukan penelitian oleh petugas tim intensifikasi ada beberapa SPT yang ganda atau sudah berubah.
5. Ada beberapa pemungut Pajak di desa tidak segera menyetorkan uang pelunasan SPPT PBB yang sudah diterima dari wajib pajak ke petugas koordinator ditingkat desa atau kecamatan dan juga dapat disetor langsung ke Kas Daerah melalui BPD Jateng.
6. Peralihan pelayanan perijinan dari kecamatan ke Kabupaten.
7. Peralihan pelayanan administrasi dan kependudukan dari kecamatan ke desa.
8. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Kegiatan Pereancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan Administrasi Keuanngan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjannan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kntor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Kegiatan Pengadaan Barang milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Penyediaan jasa Pelayanan Uum Kantor. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan, Pemeliharaaan /Rehabilitasi gedung , kantor dan bangunan lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya. Program Pemberdayaa MasyarakatDesa dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Fasilitas Penyusunan prograam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa, Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan dan penyelarasan target kinerja dan penganggaran kegiatan yang baik;
2. Pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya;
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat kecamatan;
4. Dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada dasarnya semua program dan kegiatan pada tahun 2021 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan akan tetapi masih ada yang harus diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indicator kinerja.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

s.d. Tahun 2022\* Kabupaten Banjarnegara

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023  | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020  | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021  | Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022  | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021  | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021  | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022  | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=7/6 | (9) | (10)=5+7+9 | (11)=10/4 |
|  | Uraian Perencanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** |  Nilai IKM |  | 80,37 | 80,00 | 80,53 | 100% | 81,00 | 81,00 | 100% |
|  |  | Nilai SAKIP |  | C | CC | CC | CC | B | CC | 0 |
|  |  | Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Prosentase keselarasan dokumen perencanaan** |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen pelaporan yang disusun |  | 8 dok | 8 dok | 8 dok | 100% | 8 dok | 8 dok | 100% |
|  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Prosentase ketepatan****penyusunan dokumen pelaporan keuangan** |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Penyedia gaji dan tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayarkan |  | 15 ASN | 15 ASN | 15 ASN | 100% | 15 ASN | 15 ASN | 100% |
|  | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan |  | 7 Orang | 7 Orang | 7 Orang | 100% | 7 Orang | 7 Orang | 100% |
|  | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran | Jumlah laporan keuangan yang disusun |  | 7 lap | 7 lap | 7 lap | 100% | 7 lap | 7 lap | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 100% | 1 tahun | 1 tahun | 100% |
|  | Penyedia bahan logistik kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi |  | 5Paket | 5Paket | 5Paket | 100% | 5Paket | 5Paket | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi |  | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 100% | 1 tahun | 1 tahun | 100% |
|  | Penyedia jasa pelayanan umum kantor | Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang terbayarkan |  | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 100% | 2 Orang | 2 Orang | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur** |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara |  | 9 unit | 9 unit | 9 unit | 100% | 9 unit | 9 unit | 100% |
|  | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara |  | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 100% | 3 Unit | Unit | 100% |
|  | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara |  | 5 Paket | 5 Paket | Paket | 100% | 5 Paket | 5 Paket | 100% |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha | Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani |  | 5750 Pemohon | 5750 Pemohon | 5750 Pemohon | 100% |  |  |  |
|  | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peizinan | Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan |  | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 100% | 2 Orang | 2 Orang | 100% |
|  | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah pengelola SPPT PBB tersalurkan |  | 48976 lembar | 48976 lembar | 48976 lembar | 100% | 49000 lembar | 49000 lembar | 100% |
|  | **PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terlaksana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia , TNI dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Jumlah Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia , TNI dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan yang terlaksana |  | 16 desa | 16 desa | 16 desa | 100% | 16 desa | 16 desa | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan** |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  | Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan tugas forkompimca |  | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 100% | 1 tahun | 1 tahun | 100% |
|  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan desa |  | 16 desa | 16 desa | 16 desa | 100% | 16 desa | 16 desa | 100% |
|  | Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa |  | 16 desa | 16 desa | 16 desa | 100% | 16 desa | 16 desa | 100% |
|  | Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah pembinaan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa |  | 16 desa | 16 desa | 16 desa | 100% | 16 desa | 16 desa | 100% |
|  | Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah pembinaan trantibum |  | 16 desa | 16 desa | 16 desa | 100% | 16 desa | 16 desa | 100% |
|  | Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Jumlah pembinaan penyusunan program PMD |  | 16 desa | 16 desa | 16 desa | 100% | 16 desa | 16 desa | 100% |
|  | Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Jumlah koordinasi pendampingan desa |  | 16 desa | 16 desa | 16 desa | 100% | 16 desa | 16 desa | 100% |

1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 (tiga) Indikator.yaitu Nilai IKM, Nilai SAKIP dan Prosentase Realisasi SPPT PBB Dari 3 (tiga) indikator tersebut berstatus 2 tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang di inginkan sesuai dengan rencana kerja
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncakan sebelumnya

dan yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Tidak ada pemohon Perijinan usaha , kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami kelesuan karena dampak pendemi Covid19.
2. Adanya pelayanan menggunakan aplikasi pelayanan digital atau online khususnya untuk pelayanan pengantar akte kelahiran, kematian, pengantar pindah keluar dan pengantar datang.
3. Larangan dari Pemerintah dalam rangka menekan penyebaran Covid19, untuk melarang penyelenggaraan keramaian.
4. Adanya Peralihan pelayanan administrasikependudukan dari kecamatan ke desa.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel

Berikut

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK LPPD | Target Renstra Perangkat Daerah | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Nilai IKM |  | - | 100% | 100% | 100% | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Nilai SAKIP |  |  | B | B |  |  |  CC | CC | CC |  |  |
| 3 | Prosentase Realisasi SPPT PBB |  |  | 100% |  |  |  | 99,8 % | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan, yaitu Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuanSDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.
4. Sarana prasarana yang belum memadai untuk pelayanan administrasi dan kependudukan;
5. Sarana prasarana dan gedung kantor dengan kondisi yang kurang memadai/ layak;
6. Beberapa program/ kegiatan dilaksanakan oleh OPD langsung ke desa dan kurang koordinasi dengan kecamatan;
7. Adanya pandemi virus covid-19 yang telah merubah dan

mengganggu semua lini kehidupan

Berdasarkan Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indicator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Rendahnya Mutu Pelayanan Publik
4. Rendahnya Tata Kelola Administrasi
5. Belum optimalnya hasil pekerjaan
6. Belum optimalnya Pendampingan Desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Masih kurangnya jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja
3. Peluang kerja saat pandemic covid-19 mengharuskan lebih banyak daring tanpa banyak sentuhan fisik,seharusnya lebih mempercepat proses pelayanan karena tidak ada batasan ruang dan waktu.
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana prasarana umum dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis.Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2023 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023, adalah tantang kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah terkait peralihan anggaran untuk penanggulangan covid-19

1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023 meliputi:

1. Terpenuhinya Gaji dan tunjangan ASN, PTT dan THL
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan di Kecamatan Mandiraja
3. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Mandiraja.
4. Meningkatnya peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

| No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting |
| --- | --- | --- | --- |
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Program Penunjang Urusan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota** |  |  |  |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota** |  |  |  |  |  |
|  | *Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* |  |  |  |  | *Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* |  |  |  |  |  |
|  | Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat daerah | Kec.Mandiraja | Jumlah dokumen yang tersusun | 8 dok |  1.840.800  | Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat daerah | Kec.Mandiraja | Jumlah dokumen yang tersusun | 8 dok | 1.840.800 |  |
|  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec.Mandiraja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 laporan |  1.575.600  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec.Mandiraja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 laporan |  1.575.600  |  |
|  | *Kegiatan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah* |  |  |  |  | *Kegiatan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah* |  |  |  |  |  |
|  | Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Kec.Mandiraja | Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN | 15 ASN |  1.559.371.294  | Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Kec.Mandiraja | Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN | 15 ASN |  1.559.371.294  |  |
|  | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec.Mandiraja | Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6 dok |  42.720.000  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec.Mandiraja | Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6 dok |  42.720.000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kec.Mandiraja | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 7 lap |  1.032.900  | Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kec.Mandiraja | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 7 lap |  1.032.900  |  |
|  | *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* |  |  |  |  | *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* |  |  |  |  |  |
|  | Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Mandiraja | Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 2.500.000 | Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Mandiraja | Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 2.500.000 |  |
|  | Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Mandiraja | Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan | 1 paket | 5.495.600 | Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Mandiraja | Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan | 1 paket | 5.495.600 |  |
|  | Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Mandiraja | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan | 5 paket |  71.100.300  | Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Mandiraja | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan | 5 paket |  71.100.300  |  |
|  | *Kegiatan. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* |  |  |  |  | *Kegiatan. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* |  |  |  |  |  |
|  | Sub. Kegiatan Pengadaan Mebeler | Kec. Mandiraja | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 8 unit | 16.000.000 | Sub. Kegiatan Pengadaan Mebeler | Kec. Mandiraja | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 8 unit | 16.000.000 |  |
|  | Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Mandiraja | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan | 7unit | 45.125.000 | Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Mandiraja | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan | 7unit | 45.125.000 |  |
|  | Sub. Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kec. Mandiraja | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 7 unit | 16.000.000 | Sub. Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kec. Mandiraja | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 7 unit | 16.000.000 |  |
|  | Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Mandiraja | Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan | 4 unit | 50.500.000 | Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Mandiraja | Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan | 4 unit | 50.500.000 |  |
|  | Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Mandiraja | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 paket | 29.500.000 | Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Mandiraja | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 paket | 29.500.000 |  |
|  | *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* |  |  |  |  | *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* |  |  |  |  |  |
|  | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik | Kec.Mandiraja | Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 6 laporan | 13.300.000 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik | Kec.Mandiraja | Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 6 laporan | 13.300.000 |  |
|  | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Mandiraja | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 99.287.556 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Mandiraja | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 99.287.556 |  |
|  | *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penu njang Urusan Pemerintah Daerah* |  |  |  |  | *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penu njang Urusan Pemerintah Daerah* |  |  |  |  |  |
|  | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Mandiraja  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 unit | 13.658.600 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Mandiraja  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 unit | 13.658.600 |  |
|  | Sub. Kegiatan Pemeliharan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kec. Mandiraja | Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 45.580.000 | Pemeliharan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kec. Mandiraja | Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 45.580.000 |  |
|  | Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. mandiraja | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilatasi  | 5 Paket | 12.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. mandiraja | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilatasi  | 5 Paket | 12.000.000 |  |
|  | **Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik** |  |  |  |  | **Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik** |  |  |  |  |  |
|  | *Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Prasarana Pelayanan Umum* |  |  |  |  | *Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Prasarana Pelayanan Umum* |  |  |  |  |  |
|  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 dok | 20.000.000 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 dok | 20.000.000 |  |
|  | *Kegiatan Pelaksana Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* |  |  |  |  | *Kegiatan Pelaksana Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* |  |  |  |  |  |
|  | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 914.900 | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 914.900 |  |
|  | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan | Kec.Mandiraja | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan  | 1 laporan | 9.100.000 | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan | Kec.Mandiraja | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan  | 1 laporan | 9.100.000 |  |
|  | Sub. Kegiatan Pelakaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | Kec.Mandiraja | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 laporan | 105.878500 | Sub. Kegiatan Pelakaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | Kec.Mandiraja | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 laporan | 105.878500 |  |
|  | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** |  |  |  |  | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** |  |  |  |  |  |
|  | *Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* |  |  |  |  | *Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* |  |  |  |  |  |
|  | Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Mandiraja | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 1.725.000 | Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Mandiraja | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 1.725.000 | Sub.  |
|  | **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** |  |  |  |  | **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** |  |  |  |  |  |
|  | *Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* |  |  |  |  | *Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* |  |  |  |  |  |
|  | Sub. Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Mandiraja | Jumlah Laporan Pe;aksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 2 laporan  | 5.000.000 | Sub. Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Mandiraja | Jumlah Laporan Pe;aksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 2 laporan  | 5.000.000 |  |
|  | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** |  |  |  |  | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** |  |  |  |  |  |
|  | *Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah* |  |  |  |  | *Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah* |  |  |  |  |  |
|  | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 dok | 14.000.000 | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 dok | 14.000.000 |  |
|  | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** |  |  |  |  | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** |  |  |  |  |  |
|  | *Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* |  |  |  |  | *Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* |  |  |  |  |  |
|  | Sub. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 2 dokumen | 3.665.000 | Sub. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 2 dokumen | 3.665.000 |  |
|  | Sub. Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec.Mandiraja | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | 2 doumen | 8.550.400 | Sub. Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec.Mandiraja | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | 2 doumen | 8.550.400 |  |
|  | Sub. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuanagan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 dokumen | 5.790.000 | Sub. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuanagan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 dokumen | 5.790.000 |  |
|  | Sub. Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pemilihan Kepala Desa |  |  | Sub. Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pemilihan Kepala Desa |  |  |  |
|  | Sub. Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | - |  | Sub. Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | - |  |  |
|  | Sub. Kegiatan Fasilitas Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1dok | 1.769.700 | Sub. Kegiatan Fasilitas Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1dok | 1.769.700 |  |
|  | Sub. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 dok | 3.184.600 | Sub. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1 dok | 3.184.600 |  |
|  | Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa  | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa  | 3 dok | 3.580.400 | Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa  | Kec. Mandiraja | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa  | 3 dok | 3.580.400 |  |
|  | Sub. Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa | Kec. Mandiraja | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 lap | 14.725.000 | Sub. Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa | Kec. Mandiraja | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 lap | 14.725.000 |  |

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Tersedianya sumber Anggaran untuk membiayai Program dan Kegiatan.
2. Adanya Sumber daya Manusia yang Profesional

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD.Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Usulan Kegiatan PIK Kecamatan Mandiraja untuk Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

| No | Program/kegiatan/ sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Besaran Anggaran Per Desa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pemeliharaan Jalan Desa**  |  |  |  |  |
| 1 | Rehab Aspal RT 03 RW 02 perbatasan desa Panggisari | Kertayasa |  |  | 135.000.000 |
| 2 | Peningkatan jalan Rt 03 RW 04 | Kebanaran |  |  | 248.000.000 |
| 3 | Peningkatan jalan perbatasan Glempang dan desa Salamerta | Glempang |  |  | 135.000.000 |
| 4 | Pengaspalan jalan RT 02 RW 02 Dusun 1 | Kebakalan |  |  | 118.000.000 |
| 5 | Pengaspalan jalan RT 01 RW 03 | Panggisari |  |  | 200.000.000 |

1. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan.Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

| No | Program/kegiatan/ sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Validasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

 1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing,

dengan program prioritas sebagai berikut:

1. Perlindungan social dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan produktivitas dan daya saing

 2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,

 Dengan program prioritassebagaiberikut:

a. Revolusi mental dan pembinaan ideology pancasila;

b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;

c. Memperkuat moderasi beragama;

d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dankreativitas

1. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi

 pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut:

* 1. Konsolidasi demokrasi;
	2. Penegakan hokum nasional;
	3. Reformasi birokrasi dan tata keloladan;
1. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan

* 1. Program dan Kegiatan

|  |
| --- |
| **Program dan Kegiatan Perangkat Daerah** |
| **Kabupaten Banjarnegara** |
| **Tahun 2023** |

|  |
| --- |
| **Program dan Kegiatan Perangkat Daerah** |
| **Kabupaten Banjarnegara** |
| **Tahun 2023** |
| **Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Mandiraja** |
| **Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Mandiraja** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kode | Urusan/ | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2023 | Catatan  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |
| Bidang urusan/ | Capaian | Keluaran | Hasil | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu | Sumber | Penting | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/ |
| Program/ | Program | Sub | Kegiatan | output | Program | Keluaran | Hasil | Indikatif | Dana |   | Tolok | Target | Pagu Indikatif |
| Kegiatan/Sub |   | Kegiatan |   | kegiatan |   | Sub  | Kegiatan | (Rp) |   |   | ukur |   | (Rp) |
| Kegiatan |   |   |   |   |   | Kegiatan |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | **UNSUR KEWILAYAHAN** |   |   |   |   |   |   |   | **2.228.426.350** | DAU |   |   |   | **2.242.736.750** |
| 7 | .01 | .01 |   |   | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA** | Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota |   | 100% | Kec. Mandiraja | 100% |   |   | 2.026.587.650 | DAU |   | Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota | 100% | 2.034.586.950 |
| 7 | .01 | .01 | 2 |   | ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*** | *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah* |   | 100% | Kec. Mandiraja |   |   |   | 3.416.400 | DAU |   | *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah* | 100% | 3.415.600 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .01.01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah | Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah | 8 dokumen | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah | 8 dokumen | 1.840.800 | DAU |   | Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah | 8 dokumen | 1.840.000 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 dokumen | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 dokumen |  | DAU |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 dokumen | 1.575.600 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .01.06 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |   |   | Kec. Mandiraja |   |   |   | 1.603.124.194 | DAU |   |   |   | 1.603.124.294 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .02.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN | 15 orang/bulan | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN | 15 orang/bulan | 1.559.371.294 | DAU |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN | 15 orang/bulan | 1.559.371.294 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .02.03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 42.720.000 | DAU |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 42.720.000 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 dokumen | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 7 dokumen | 1.032.900 | DAU |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 dokumen | 1.033.000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .02.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah |   |   | Kec. Mandiraja |   |   |   | 81.595.900 | DAU |   |   |   | 84.595.900 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 5.000.000 | DAU |   | Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 5.000.000 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan | 1 paket/1 tahun | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan | 1 paket/1 tahun | 5.495.600 | DAU |   | Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan | 1 paket/1 tahun | 5.495.600 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan | 1 paket/1 tahun | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan | 1 paket/1 tahun | 71.100.300 | DAU |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan | 1 paket/1 tahun | 74.100.300 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |   | Kec. Mandiraja |   |   |   | 157.125.000 | DAU |   |   |   | 162.125.000 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .07.04 | Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Gedung Kantor atau BangunanLainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan | 4 paket | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan | 4 paket | 50.500.000 | DAU |   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan | 4 paket | 53.000.000 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .07.05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 8 unit | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 8 unit | 16.000.000 | DAU |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 8 unit | 16.000.000 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan | 3 unit | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan | 3 unit | 45.125.000 | DAU |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan | 3 unit | 45.125.000 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 7 unit | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 7 unit | 16.000.000 | DAU |   | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 7 unit | 16.000.000 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .07.08 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan | 5 paket | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan | 5 paket | 29.500.000 | DAU |   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan | 6 paket | 32.000.000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |   |   | Kec. Mandiraja |   |   |   | 97.487.556 | DAU |   |   |   | 97.487.556 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .08.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 10.800.000 | DAU |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 10.800.000 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 86.687.556 | DAU |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 86.687.556 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |   |   | Kec. Mandiraja |   |   |   | 83.838.600 | DAU |   |   |   | 83.838.600 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .09.01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 unit | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 unit | 13.658.600 | DAU |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 unit | 13.658.600 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 58.180.000 | DAU |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 58.180.000 |
| 7 | .01 | .01 | 2 | .09.10 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi |   | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi |   | 12.000.000 | DAU |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi |   | 12.000.000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | .01 | .02 |   |   | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |   |   | Kec. Mandiraja | 100% |   |   | 135.893.400 | DAU |   | Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100% | 140.014.900 |
| 7 | .01 | .02 | 2 | .04 | ***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat*** | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat |   |   | Kec. Mandiraja |   |   |   | 115.893.400 | DAU |   |   |   | 120.014.900 |
| 7 | .01 | .02 | 2 | .04.01 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yangTerkait dengan Non Perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinanpada Urusan Pemerintahan | 1 laporan | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinanpada Urusan Pemerintahan | 1 laporan | 9.100.000 | DAU |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinanpada Urusan Pemerintahan | 1 laporan | 9.100.000 |
| 7 | .01 | .02 | 2 | .04.02 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 dokumen | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 914.900 | DAU |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 914.900 |
| 7 | .01 | .02 | 2 | .04.03 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 laporan | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 laporan | 105.878.500 | DAU |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 laporan | 110.000.000 |
| 7 | .01 | .02 | 2 | .03.01 | ***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*** | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |  |   | Kec. Mandiraja |   |  |   | 20.000.000 |   |   |  |   | 20.000.000 |
|   |   |   |   |   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Terlaksananya Urusan Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang sudah Teraksana |   | Kec. Mandiraja |   |   |   | 20.000.000 |   |   |   |   | 20.000.000 |
| 7 | .01 | .03 |   |   | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan |   |   | Kec. Mandiraja | 100% |   |   | 1.725.200 | DAU |   | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100% | 2.175.200 |
| 7 | .01 | .03 | 2 | .01 | ***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*** | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |   |   | Kec. Mandiraja |   |   |   | 1.725.200 | DAU |   |   |   | 2.175.200 |
| 7 | .01 | .03 | 2 | .01.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa | 10 lembaga kemasyarakatan | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa | 10 lembaga kemasyarakatan | 1.725.200 | DAU |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa | 10 lembaga kemasyarakatan | 2.175.200 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | .01 | .04 |   |   | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase terlaksananya program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum |   |   | Kec. Mandiraja | 100% |   |   | 5.000.000 | DAU |   | Persentase terlaksananya program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 100% | 5.000.000 |
| 7 | .01 | .04 | 2 |   | ***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*** | *Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* |   |   | Kec. Mandiraja |   |   |   | 5.000.000 | DAU |   |   |   | 5.000.000 |
| 7 | .01 | .04 | 2 | .01.01 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat | 1 laporan | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat | 1 laporan | 5.000.000 | DAU |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat | 1 laporan | 5.000.000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | .01 | .05 |   |   | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum |   |   | Kec. Mandiraja | 100% |   |   | 14.000.000 | DAU |   | Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum | 100% | 14.000.000 |
| 7 | .01 | .05 | 2 | .01 | ***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*** | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  |   | Kec. Mandiraja |   |  |   | 14.000.000 | DAU |   |  |   | 14.000.000 |
| 7 | .01 | .05 | 2 | .01.08 | Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan | Terlaksananya Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan | 1 dokumen | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan | 1 dokumen | 14.000.000 | DAU |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan | 1 dokumen | 14.000.000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DAU |   |   |   |   |
| 7 | .01 | .06 |   |   | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa |   |   | Kec. Mandiraja | 100% |   |   | 45.220.100 | DAU |   | Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100% | 46.959.700 |
| 7 | .01 | .06 | 2 | .01 | ***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*** | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |   |   | Kec. Mandiraja |   |   |   | 45.220.100 | DAU |   |   |   | 46.959.700 |
| 7 | .01 | .06 | 2 | .01.01 | Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa |   | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa |   | 0 | DAU |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa | 0 | 0 |
| 7 | .01 | .06 | 2 | .01.02 | Fasilitasi administrasi pemerintahan desa | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2 dokumen | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2 dokumen | 8.550.400 | DAU |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2 dokumen | 8.550.400 |
| 7 | .01 | .06 | 2 | .01.03 | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa | 1 dokumen | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa |  PIHAK PERTAMA, | 5.790.000 | DAU |   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa | 1 dokumen | 5.790.000 |
| 7 | .01 | .06 | 2 | .01.09 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah denganPembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa | 1 dokumen | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa |   | 1.769.700 | DAU |   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa | 1 dokumen | 2.219.700 |
| 7 | .01 | .06 | 2 | .01.11 | Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum | 1 dokumen | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum |   | 2.494.600 | DAU |   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum | 1 dokumen | 2.944.600 |
| 7 | .01 | .06 | 2 | .01.16 | Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Programdan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaProgram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 3 dokumen | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaProgram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |   | 3.580.400 | DAU |   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaProgram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 3 dokumen | 4.030.000 |
| 7 | .01 | .06 | 2 | .01.17 | Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa diWilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya | 2 laporan | Kec. Mandiraja |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya |   | 23.035.000 | DAU |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya | 2 laporan | 23.425.000 |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2017-2022.Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan

Sebagai berikut

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara

pada tanggal : 07 Januari 2022

CAMAT MANDIRAJA

**ANANG SUTANTO, S.STP,M.Si**

 Pembina Tingkat I

NIP.19750730 199602 1 002